

**KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM
PENGELOLAAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP DI KABUPATEN SIJUNJUNG DAN
KABUPATEN DHARMASRAYA**

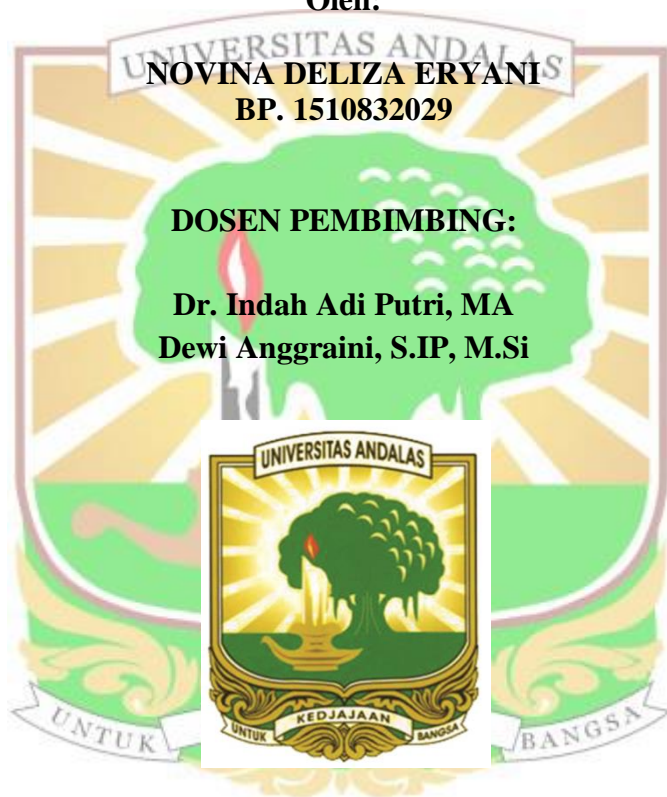
SKRIPSI

Oleh:

**NOVINA DELIZA ERYANI
BP. 1510832029**

DOSEN PEMBIMBING:

**Dr. Indah Adi Putri, MA
Dewi Anggraini, S.IP, M.Si**



JURUSAN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

ABSTRAK

NOVINA DELIZA ERYANI, 1510832029. Skripsi S1. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Judul Skripsi “Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Sijunjung Dan Kabupaten Dharmasraya”. Dibimbing Oleh: Dr. Indah Adi Putri, MIP dan Dewi Anggraini, SIP, M.Si. Skripsi ini terdiri dari 153 halaman, dengan 34 referensi: 14 buku, 5 Skripsi/Tesis, 15 sumber elektronik

Meningkatnya angka kerusakan lingkungan hidup akibat ilegal logging, perkebunan kelapa sawit dan pertambangan ilegal banyak terjadi di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung. Maka dari itu pemerintahan kabupaten dituntut mengeluarkan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh apa kebijakan publik telah menyelesaikan persoalan kerusakan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan tipe instrumental. Untuk itu, penelitian ini menggunakan analisis isi kebijakan yang berpedoman pada konsep Kebijakan Publik dari Thomas R Dye dan Analisis Kebijakan Publik dari William N Dunn. Analisis isi kebijakan publik tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya telah sama-sama meletakkan permasalahan kerusakan lingkungan hidup sebagai sebuah masalah publik. Hingga masalah tersebut direspon dengan mengeluarkan sejumlah peraturan. Namun, setelah dianalisis isi kebijakan tersebut ternyata hanya menjelaskan mengenai pengelolaan lingkungan hidup secara umum dan belum memuat secara mendalam mengenai pemecahan masalah terhadap kerusakan lingkungan hidup yang terjadi.

Bukan hanya itu saja, analisis isi kebijakan ini juga menunjukkan bahwa ada sejumlah permasalahan yang belum termuat dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. Salah satunya berkaitan dengan pemindahan kewenangan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten kepada Pemerintahan Provinsi dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang membawa pengaruh pada jalannya kebijakan lingkungan hidup di tingkat daerah khususnya Kabupaten.

Kata Kunci: Kebijakan, Lingkungan Hidup, Pemerintahan Daerah

ABSTRACT

NOVINA DELIZA ERYANI, 1510832029. S1Thesis. Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Thesis Title 'Regional Government Policy in Managing Environmental Damage in Sijunjung and Dharmasraya Districts'. Supervised by: Dr. Indah Adi Putri, MIP and Dewi Anggraini, SIP, M.Sc. This thesis consists of 153 pages, with 34 references: 16 books, 6 Thesis / Dissertation, 18 electronic sources

Increasing environmental damage due to illegal logging, oil palm plantations and illegal mining has occurred in Dharmasraya District and Sijunjung District. Therefore the district government is required to issue a policy. This study aims to see the extent to which public policy has resolved the problem of environmental damage. This study uses a qualitative case study method with an instrumental type. For this reason, this research uses content analysis based on the concept of Public Policy from Thomas R Dye and Public Policy Analysis from William N Dunn. Analysis of the contents of the public policy shows that Sijunjung Regency and Dharmasraya District have both put the problem of environmental damage as a public problem. Until the problem was responded to by issuing a number of regulations. However, after analyzing the contents of the policy it turns out that it only explains the management of the environment in general and does not contain in depth the problem solving for environmental damage that occurs.

Not only that, the analysis of the contents of this policy also shows that there are a number of problems that have not been contained in the policies issued by Sijunjung Regency and Dharmasraya District. One of them relates to the transfer of authority from the Regency Government to the Provincial Government in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government which has an influence on the running of environmental policies at the regional level, especially in the Regency.

Keywords: Policy, Environment, Regional Government